

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Sikap

Sikap dinyatakan dengan istilah *attitude* yang bersal dari kata latin *aptus* yang berarti keadaan sikap secara mental yang bersifat subjektif untuk melakukan kegiatan. Sikap seseorang terbentuk karena ada objek tertentu yang memberikan rangsang pada dirinya. Sikap adalah bagian yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Sikap dapat bersifat positif dan negatif. Sikap positif memunculkan kecenderungan untuk menyenangkan, mendekati, menerima, atau bahkan mengharapkan kehadiran objek tertentu. Sedangkan sikap negatif memunculkan kecenderungan untuk menjahui, membenci, menghindari, menghindari ataupun tidak menyukai keberadaan suatu objek.

Sikap merupakan konsep paling penting dalam psikologis social. Pembahasan berkaitan dengan psikologis *social* hampir selalu menyertakan unsur sikap baik sikap individu maupun sikap kelompok sebagai salah satu bagian dari pembahasannya. sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang dapat diramalkan tingkah laku

apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan tingkah laku. Dalam pergaulan sehari-hari sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan social. Seperti halnya teori sikap yang dikemukakan oleh (Mar'at, 1984:10), Ia mengemukakan bahwa “sikap diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas”.

Pengertian sikap dikemukakan oleh Aiken dalam Ramdhani (2009;11), mendefinisikan “sikap sebagai predisposisi atau kecenderungan yang dipelajari dari seorang individu untuk merespon secara positif atau negatif dengan intensitas yang moderat atau memadai terhadap objek, situasi, konsep atau orang lain”. Sementara itu, Chalpin dalam Ali dan Asrori (2008:141) “menyamakan sikap sama dengan pendirian. Lebih lanjut dia mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap orang lain, objek, lembaga atau persoalan tertentu”. Sedangkan Thurston dalam Bimo Walgito (2003:109) “menyatakan sikap adalah suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis.

Afeksi yang positif ialah afeksi senang, sedangkan afeksi negatif adalah afeksi yang tidak menyenangkan”. Kemudian menurut Gerung dalam

Sunarto dan Agung Hartono (2002:170) “sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal”.

Berdasarkan definisi-definisi sikap yang telah dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak, berfikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai untuk menentukan apakah orang harus setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu menentukan apa yang disukai, diharapkan, baik yang bersifat positif maupun negatif.

2. Pemahaman Makna Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini tertulis di dalam lambang negara Indonesia, Burung Garuda Pancasila. Pada kaki Burung Garuda itulah terpampang dengan jelas tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Secara konstitusional, hal tersebut telah diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” memuat dua konsep yang berbeda, bahkan kedua konsep tersebut seolah-olah bersifat kontradiktif. Kedua konsep itu adalah “Bhinneka” dan “Tunggal Ika”. Konsep “Bhinneka” mengakui adanya keanekaan atau keragaman, sedangkan konsep “Tunggal Ika” menginginkan adanya kesatuan. Keanekaan dicirikan oleh adanya perbedaan, sedangkan kesatuan dicirikan oleh adanya kesamaan. Jika kedua hal tersebut dipahami dan dilaksanakan dengan tekanan yang berbeda (tidak seimbang),

maka akan dapat menimbulkan kondisi yang berbeda pula. Manakala segi keanekaan yang menonjolkan unsur perbedaan itu ditampilkan secara berlebihan, maka kemungkinan munculnya konflik tak terhindarkan, sebaliknya manakala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu ditampilkan secara berlebihan, maka tindakan itu tergolong melanggar kodrat perbedaan, karena perbedaan adalah kodrat sekaligus berkah yang tak terelakkan. Adanya dua konsep yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” mengandung problem metafisika, yaitu problema antara kepelbagaian dan kesatuan, problem antara hal banyak (*the many*) dan hal satu (*the one*). Berdasarkan problema tersebut tampak bahwa untuk mencari makna “Bhinneka Tunggal Ika” diperlukan adanya perenungan mendalam yang bersifat filosofis metafisis.

Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” dipetik dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 pupuh 139. Bait ini secara lengkap dalam (Id-wikipedia: 2013) seperti di bawah ini:

*Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Terjemahan:

*Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu.
Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.*

Kitab Sutasoma mengajarkan toleransi kehidupan beragama, yang menempatkan agama Hindu dan agama Buddha hidup bersama dengan rukun dan damai. Kedua agama itu hidup beriringan di bawah payung kerajaan, pada jaman pemerintahan raja Hayam Wuruk. Meskipun agama Hindu dan Buddha merupakan dua substansi yang berbeda, namun perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan, karena kebenaran Hindu dan Buddha ber-muara pada hal “Satu”. Hindu dan Buddha memang berbeda, tetapi sesungguhnya satu jenis, tidak ada perbedaan dalam kebenaran.

Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” yang semula menunjukkan semangat toleransi keagamaan, kemudian diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia. Sebagai semboyan bangsa konteks permasalahannya bukan hanya menyangkut toleransi beragama tetapi jauh lebih luas seperti yang umum disebut dengan istilah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Semboyan itu dilukiskan di bawah lam-bang negara Indonesia yang dikenal dengan nama Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia lengkap dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara.

Jika dianalisis, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berasal dari bahasa Sansekerta itu terdiri dari kata “Bhinneka”, “Tunggal”, dan “Ika”. Kata “Bhinneka” berasal dari kata “Bhinna” dan “Ika”. “Bhinna” artinya berbeda-beda dan “Ika” artinya itu. Jadi, kata “Bhinneka” berarti “yang berbeda-beda itu”. Analisa lain menunjukkan bahwa kata “bhinneka” terdiri dari unsur kata “bhinn-a-eka”. Unsur “a” artinya tidak, dan “eka” artinya satu. Jadi, kata

“Bhinneka” juga dapat berarti “yang tidak satu”. Sedangkan kata “Tunggal” artinya satu, dan “Ika” artinya itu. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” berarti “yang berbeda-beda itu dalam yang satu itu” atau “beranekaragam namun satu jua”. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika hampir sama artinya dengan semboyan negara Amerika Serikat, *E Pluribus Unum* yang artinya bersatu walaupun berbeda-beda, berjenis-jenis tetapi tunggal.

Kebhinnekaan atau yang berbeda-beda itu menunjuk pada realitas objektif masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dite-mukan dalam berbagai bidang kehidupan. Keaneka-ragaman di bidang politik diwarnai oleh adanya kepentingan yang berbeda-beda antara individu atau kelompok yang satu dengan individu atau kelompok yang lainnya. Di bidang ekonomi, keanekaragaman dapat dilihat dari adanya perbedaan kebutuhan hidup, yang akhirnya berimplikasi terhadap munculnya keanekaragaman pada pola produksi.

Di bidang sosial, keberagaman itu tercermin dari adanya perbedaan peran dan status sosial. Selain itu, ke-anekaragaman juga dapat dilihat dari segi geografis, budaya, agama, etnis, dan sebagainya. Keaneka-ragaman itu pun masih dikukuhkan lagi oleh kebhinnekaan perseorangan masing-masing anak negeri yang kini berjumlah lebih dari 200 juta jiwa. Dengan adanya keanekaragaman dalam berbagai bidang tersebut menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai masyarakat yang multi etnik, multi agama (multi religi), multi budaya

(multikultural), dan sebagainya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk (*Plural Society*).

Jika dilihat dari struktur sosialnya, keanekaragaman atau kemajemukan masyarakat Indonesia berdimensi ganda, karena memiliki kemajemukan secara horizontal dan vertikal. Kemajemukan secara horizontal dalam sosiologi dikenal dengan istilah deferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan suatu sistem kelas sosial dengan sistem linear atau tanpa membeda-bedakan tinggi-rendahnya kelas sosial itu sendiri. Misalnya, perbedaan agama, ras, etnis, clan (klan), pekerjaan, budaya, maupun jenis kelamin. Kemajemukan secara vertikal melahirkan stratifikasi sosial. Dalam Sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya, seperti lapisan kaya dan miskin, penguasa dan jelata.

Makna kesatuan (*tunggal ika*) dalam *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan cerminan rasionalitas yang lebih menekankan kesamaan daripada perbedaan. Kesatuan merupakan sebuah gambaran ideal. Dikatakan ideal karena kesatuan merupakan suatu harapan atau cita-cita untuk mengangkat atau menempatkan unsur perbedaan yang terkandung dalam keanekaragaman bangsa Indonesia ke dalam suatu wadah, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan adalah upaya untuk menciptakan wadah yang mampu menyatukan kepelbagaian atau keanekaragaman.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk, namun tetap menjunjung tinggi kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan keekaan, antara keragaman dan kesatuan, antara hal banyak dan hal satu, atau antara pluralisme dan monisme.

Bhinneka Tunggal Ika adalah cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan (Rizal Mustansyir, 2009 : 52). Keseimbangan itu sendiri merupakan konsep filsafati yang selalu terletak pada ketegangan di antara dua titik ekstrim, yaitu keanekaan mutlak di satu pihak dan kesatuan mutlak di pihak lain. Setiap kali segi keanekaan yang menonjolkan perbedaan itu memuncak akan membawa kemungkinan munculnya konflik, maka kesatuanlah yang akan meredakan atas dasar kesadaran nasional. Demikian pula sebaliknya, mana-kala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu tampil secara berlebihan, maka keanekaan selalu mengingatkan bahwa perbedaan adalah kodrat se-kaligus berkah yang tak terelakkan.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan yang mengakui realitas bangsa Indonesia yang majemuk (berbhinneka), namun selalu mencita-citakan terwujudnya kesatuan (ketunggal-ikaan). Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika berarti Indonesia selain mengakui adanya keragaman juga mengakui adanya kesatuan.

Dalam kehidupan bersama kebhinnekaan bisa menjadi berkah atau sebaliknya sumber bencana tergantung cara kita memandang dan mengelolanya. Tirta N Mursita dalam Taneko B. Soleman (2010 : 32) mengatakan bahwa keberagaman itu *given* (berkah), tak bisa dihindari di dunia ini. Siapa yang bisa mengelak kalau ada kulit hitam, putih, kuning, dan cokelat di dunia ini. Siapa pula yang menafikan, kalau ada ratusan, ribuan bahkan jutaan pemikiran baru di alam ini. Semua saling bertumpuk-tumpuk, memberikan tesis dan antitesis baru. Kebhinnekaan merupakan ciri dasar bangsa Indonesia sejak Republik ini dibentuk, kemudian diproklamasikan oleh para *founding fathers* pada paruh kedua abad silam hingga kini. Sebagai suatu realitas objektif, maka kebhinnekaan telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Karena itu, upaya-upaya untuk meniadakan keberagaman atau upaya penyeragaman merupakan tindakan yang menentang kenyataan. Kalau keberagaman itu tidak boleh ada di Indonesia, berarti identitas bangsa tidak ada lagi.

Untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa, kebhinnekaan sebaiknya tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi kebhinnekaan harus dipandang sebagai aset yang diharapkan mampu berperan sebagai sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kebhinnekaan sebagai kekayaan serta mendayagunakannya justru dapat menjadi pondasi kokoh persatuan dari sebuah *imagined community* yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran sebagai masyarakat yang berbhinneka tetapi mencita-citakan kesatuan yang dikukuhkan sebagai konsensus bersama dalam Soempah Pemuda 1928 telah menjadi modal sosial ampuh yang berhasil mempersatukan dan mengantar bangsa ini melewati masa-masa sulit dari dulu sampai sekarang, bahkan juga nanti.

Seringkali kita kurang menyadari bahwa kehidupan ini juga merupakan sinergi dari kekuatan yang berbeda. Bahkan perbedaan itu sering ditempatkan pada posisi yang berlawanan dan kontradiktif, seperti atas dan bawah, kiri dan kanan, positif dan negatif, kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Dalam rancangan integrasi, perbedaan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlawanan, melainkan sebagai sesuatu yang berpasangan. Yang satu mengandaikan adanya yang lain. Ada “atas” karena ada “bawah”, ada “kiri” karena ada “kanan”, demikian seterusnya, sehingga kita juga bisa mengatakan bahwa kesatuan mengasumsikan adanya keanekaragaman. Diri kita ada merupakan hasil sinergi dari dua kekuatan yang berbeda, yaitu kekuatan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa diri ini ada sebagai produk perbedaan.

Dalam dunia pendidikan juga penuh dengan warna-warni perbedaan. Ada guru ada murid yang masing-masing memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Guru mengajar dan murid belajar. Selain itu, dalam pendidikan juga ada berbagai sarana dan prasarana. Semua unsur pendidikan yang berbeda-beda itu bersinergi sehingga terjadi proses pendidikan berupa proses belajar mengajar (PBM).

Hardono Hadi (2004: 73) juga mengatakan, “Kalau kita melihat suatu karya seni, kita akan melihat bahwa keindahannya tidak pernah didasarkan kepada keseragaman”. Keindahan justru tercipta bila terdapat perbedaan-perbedaan antara bagian-bagiannya yang dipersatukan dalam satu masyarakat yang berbhinneka yang dicirikan oleh adanya perbedaan memang sangat rawan

terhadap konflik. Indonesia sebagai masyarakat berbhinneka, secara internal telah mengandung sumber-sumber ketegangan dan pertentangan. Menurut Eka Dharmaputera (2007 : 40), baik keanekaragaman maupun kesatuan Indonesia adalah kenyataan sekaligus persoalan. Kebhinnekaan Indonesia sepintas lalu memang jauh lebih menonjol daripada kesatuannya. Oleh karena itu, bahaya disintegrasi selalu merupakan ancaman baik *real* maupun *potensial*. Jika bertumpu pada realitas bangsa yang berbhinneka, bahaya disintegrasi memang merupakan ancaman yang amat nyata. Namun karena Indonesia tidak hanya berbhinneka, tetapi juga tunggal ika, maka integrasi bukanlah sesuatu yang mustahil. Setiap pembahasan tentang Indonesia yang mengabaikan kedua atau salah satu dimensi tersebut, dapatlah dipastikan tidak akan mencapai sasaran.

Selanjutnya Eka Darmaputera (2007 : 8-9) juga mengatakan, agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik, masyarakat harus mampu mengatasi disintegrasi potensial yang ada di dalam dirinya sendiri. Seluruh masyarakat dapat berfungsi hanya apabila anggota anggotanya bersedia untuk mengintegrasikan diri, baik dalam bentuk integrasi normatif maupun integrasi nilai. Integrasi normatif tercermin dari adanya kehidupan bersama di mana seluruh anggota masyarakat bersedia mematuhi dan mengikuti “aturan permainan” yang telah ditentukan. Sedangkan integrasi nilai tercermin dari adanya nilai nilai funda-mental yang dijadikan sebagai pandangan hidup bersama.

Perbedaan dalam kebhinekaan merupakan suatu realitas, karena itu perbedaan tidak perlu lagi untuk dibeda bedakan. Membeda-bedakan perbedaan justeru akan

dapat menimbulkan bahaya disintegrasi. Perbedaan dalam kebhinnekaan perlu disinergikan atau dikelola dengan cara mendayagunakan aneka perbedaan menjadi modal sosial untuk membangun kebersamaan. Karena kesatuan dicirikan oleh adanya kesamaan, maka untuk mewujudkan cita-cita kesatuan di tengah-tengah kebhinnekaan diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk melihat kesamaan pada sesuatu yang berbeda itu.

Secara individu, setiap manusia adalah berbeda, baik dilihat dari segi fisiknya maupun mentalnya. Setiap manusia merupakan subjek yang otonom. Namun demikian, setiap manusia memiliki kesamaan, yaitu sama-sama manusia (sesama manusia). Demikian juga dalam konteks ke Indonesiaan, terdapat beragam suku, agama, ras, dan golongan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bangsa Indonesia (sesama bangsa Indonesia). Konsep “sesama” tidak hanya terbatas pada manusia. Manusia dengan binatang juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama makhluk hidup (sesama makhluk hidup). Demikian juga kesamaan bisa ditemukan dalam hubungannya dengan yang lain, sehingga muncul adanya berbagai konsep sesama, seperti sesama ciptaan Tuhan, atau sesama isi dunia, dan lain sebagainya. Inilah konsep “sesama” dalam arti luas (Pursika, 2009 : 28). kesatuan tema. Keragaman dari bagian-bagian memperkaya nilai keseluruhan dan juga saling mengangkat nilai yang dimiliki oleh setiap bagian.

3. Masyarakat Multikultur

a. Indonesia Bangsa Yang Majemuk

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Kemajukan ini di tandai oleh adanya suku suku bangsa yang masing masing mempunyai cara cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri sendiri, sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya tetapi secara bersama sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dan kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

Perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat *majemuk*. Sebuah masyarakat majemuk, dikonsepsikan oleh *Furnivall*, yakni suatu masyarakat dimana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa, sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

Suatu masyarakat dikatakan bersifat majemuk, apabila sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-kebudayaan yang bersifat *diverse*.

Pierre L. van den Berghe (1969:67) menyebutkan beberapa karakteristik berikut sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yakni:

1. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.
3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
4. Secara relative seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain.
5. Secara relative integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Kodrat integrasi pada bangsa Indonesia, tercipta oleh kesadaran kebangsaan dan cita-cita perjuangan yang di bangun melalui gairah dan kehendak yang kuat dari kodrat keanekaragaman kehidupan bangsa Indonesia. Kodrat keanekaragaman itulah yang membangun kehendak berintegrasi ke dalam suatu kesatuan bangsa, dan bercita-cita membangun satu kehidupan kebangsaan, dalam satu Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagi negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Indonesia konsep integrasi sering digunakan dalam rangka penyatuan wilayah Indonesia dalam satu wawasan disebut dengan wawasan nusantara. Adanya beberapa suku-bangsa yang di miliki oleh Indonesia, di satu pihak merupakan kebanggaan tersendiri karena memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat tinggi harganya. Namun di sisi lain dengan banyaknya jumlah suku bangsa yang ada merupakan sumber timbulnya konflik.

b. Proses Integrasi Penduduk

Proses integrasi berawal dari adanya kesempatan seseorang untuk berhubungan atau berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat melakukan kontak dengan pikiran orang lain, dan umumnya diakhiri dengan terbentuknya norma-norma kelompok yang baru. Antara dua titik temu itu sudah pasti terdapat aktivitas-aktivitas sosial ekonomi dan budaya lewat kegiatan di mana berlangsung kontak social atau interaksi. Integrasi berasal dari kata sifat *integer*, yang berarti “utuh”, “tidak bercacat”, “tidak retak”, “tidak gempil”, “bulat padu” (P. Soedarno 2008: 38) Secara etimologi, integrasi berasal dari kata latin yang artinya memberi tempat bagi suatu unsure demi suatu keseluruhan. Kemudian dari bentuk kata kerja itu di bentuk kata benda integritas yang artinya keutuhan atau kebulatan. Selanjutnya, dari kata integritas di bentuk kata sifat integer yang artinya utuh. Oleh sebab itu, istilah integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. (Emiliana Sadilah (Tesis, 1997: 24)

Sedangkan menurut P. Soedarno dalam tulisannya yang berjudul *Ilmu Sosial Dasar* (edisi 5) integrasi social adalah suatu proses dan sekaligus hasil dari proses itu, dalam mana individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang semula terkotak-kotak, berbeda-beda, bahkan bersaing atau bertentangan, menjadi rukun bersatu dan selaras, baik dalam hal kepentingan-kepentingan, soal hidup-mati, maupun dalam

hal pandangan berbagai masalah pokok dalam kehidupan social-politik-budaya masyarakat. (P. Soedarno 2008 :39)

Integrasi sosial dikatakan berhasil apabila:

- a. Seluruh anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan mereka, dan tidak saling merintangikan atau merugikan.
- b. Terdapat consensus (kesepakatan) antar kelompok mengenai norma-norma social, yang memberi arah pada tujuan yang dicita-citakan dan menjadi kajian bagi cara dan upaya untuk mewujudkannya.
- c. Bertahannya norma-norma tersebut secara relatif lama, dan tidak setiap kali berubah-ubah (konsisten).

Sejalan dengan itu, Hendropuspito dalam P. Soedarno (2008:65) berpendapat, bahwa “secara umum integrasi diartikan sebagai pernyataan secara terencana dari bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang serasi. Kata integrasi berkaitan erat dengan terbentuknya suatu bangsa, karena suatu bangsa terdiri dari berbagai unsur seperti suku/etnis, ras, tradisi, kepercayaan dan sebagainya, yang beranekaragam”.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Integrasi sosial adalah suatu proses bersatu padunya masyarakat yang berbeda suku/etnik, ras, tradisi, kepercayaan dan kebudayaan menjadi masyarakat yang utuh, hidup rukun, bersatu dan selaras dalam kehidupan social-politik-budaya.

Sedangkan menurut pakar sosiologi Manrice Duverger dalam (subpokbarab:2013), mengatakan sebagai berikut:

“Integrasi di definisikan sebagai dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian antara organisme hidup atau antar anggota-anggota dalam masyarakat sehingga integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya”

Menurut Widjaja (1986:110) integrasi adalah keserasian satuan-satuan yang terdapat dalam suatu system, dan bukan penyeragaman, namun merupakan satuan-satuan yang sedemikian rupa serta tidak merugikan masing-masing satuan. Yang baik saling mendukung satuan serta masih memiliki identitas masing-masing dan saling menguntungkan.

Sedangkan menurut Munandar Soeleman (2000:299) Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu dalam bukunya Integrasi masyarakat dapat di artikan adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga dan masyarakat secara keseluruhan sehingga menghasilkan persenyawaan-persenyawaan berupa adanya konsensus nilai-nilai yang sama-sama dijunjung tinggi. Dalam hal ini terjadi akomodasi, asimilasi, dan berkurangnya prasangka-prasangka diantara anggota masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan Integrasi sosial adalah wujud keserasian hidup masyarakat dalam suatu sistem, bukan penyeragaman karena anggota masyarakat masih memiliki identitas masing-masing, didalamnya terdapat kerjasama dari seluruh anggota

masyarakat sehingga tercapai keharmonisan hidup dan menghasilkan kesepakatan nilai-nilai yang sama-sama di junjung tinggi.

c. Integrasi Demi Kelangsungan Hidup Kelompok

Integrasi sebagai proses melalui beberapa fase, yaitu:

- a) Akomodasi
- b) Kerjasama
- c) Koordinasi
- d) Asimilasi

Integrasi sebagai salah satu proses dan hasil kehidupan social merupakan alat yang bertujuan untuk mengadakan suatu keadaan budaya yang homogen. Apabila homogenitas tercapai, kelangsungan hidup kelompok terjamin. Dalam hubungan dan usaha ini, asimilasi merupakan tahap yang paling mendekati integrasi dalam bentuk idealnya. Proses asimilasi merupakan proses searah tau sefihak, melainkan merupakan suatu proses (*two- way process*) karena menyangkut fihak yang di integrasikan dan kelompok/anggota-anggota lain yang mengintegrasikan diri.

Menurut Ogburn dan nimkoff dalam P. Soedarno (2008: 32), integrasi ialah: "*the process whereby individuals or groups once dissimilar become similar, become identified in their interest and outlook.*" Process integrasi bukan suatu proses yang berjalan cepat, karena merupakan suatu proses mental pula: "*it is a process of interpenetration and fusion in which person and group acquire the memories, sentiments and attitudes of other*

person or group and by sharing their experiences and history are incorporated with them in a cultural life". Jelaslah bahwa suatu integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma yaitu karena kelompoklah merupakan unsure yang "mengatur perilaku, dengan mengadakan tuntutan tentang bagaimana orang harus bertindak".

Integrasi berhasil apabila:

- a. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain.
- b. Apabila tercapai semacam consensus (kesepakatan) mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial
- c. Apabila norma-norma cukup lama konsisten dan tidak berubah-ubah.

d. Interaksi Sebagai Dasar Proses Sosial

1. Interaksi sosial sebagai dasar proses sosial

Setiap individu yang ingin mengenal lingkungan sekitarnya, harus melakukan interaksi dengan lingkungan dan tempat hidupnya itu. Kemudian timbul hasrat ingin hidup bersama-sama mencapai keselarsanan hidup. Dengan interaksi itulah terjadi suatu proses yang diwujudkan. Dengan proses sosial yang dimaksud adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai bidang kehidupan bersama. Kehidupan bersama itu dapat dilihat dari beberapa segi atau aspek, yaitu ada segi kehidupan ekonomi, segi kehidupan politik, segi kehidupan hukum, dan sebagainya. Jadi proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara, misalnya, segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, segi

kehidupan politik dengan segi kehidupan hukum, segi kehidupan hukum dengan ekonomi dan seterusnya.

Pada dasarnya gejala-gejala atau fenomena-fenomena, seperti ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya, itu tidak dapat bertindak. Oleh karena gejala-gejala atau fenomena-fenomena itu tidak dapat bertindak, sudah tentu tidak dapat bertindak, sudah tentu tidak akan terjadi pengaruh timbal-balik antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Pada dasarnya yang dapat bertindak jadi, yang dapat berhubungan itu adalah manusia yang mewujudkan suatu aktivitas. Dengan demikian, aktivitas sosial itu terjadi karena adanya aktivitas dari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena yang bertindak adalah manusia, jadi yang berhubungan itu adalah manusia, maka dapat dinyatakan bahwa interaksi sosial merupakan bentuk utama dari proses sosial.

2. Unsur Dasar Interaksi Sosial

Menurut Kimbal Young dalam Soeleman B. Taneko (1984:112) interaksi sosial dapat berlangsung antara:

- a) Orang-perorangan dengan kelompok atau kelompok dengan orang-perorangan (*there may be to group or group to person relation*)
- b) Kelompok dengan kelompok (*there is grup to group interaction*)
- c) Orang-perorangan (*there is person to person interaction*)

3. Ciri-Ciri Interaksi Sosial

Menurut Charles P. Lomis dalam Soeleman B. Taneko (2008:114) mengemukakan ciri-ciri penting dari interaksi sosial, yaitu:

- a) Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih,
- b) Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol,
- c) Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung,
- d) Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat.

Apabila interaksi sosial itu di ulang menurut pola yang sama dan bertahan untuk waktu yang lama, maka akan terwujud hubungan sosial (*social relation*).

4. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Oleh karena interaksi terdiri dari kontak dan komunikasi, dan di dalam proses komunikasi mungkin saja terjadi berbagai penafsiran makna perilaku; dan penafsiran makna yang sesuai dengan maksud pihak pertama akan menghasilkan suatu kondisi yang kondusif di antara kedua belah pihak yang didapat dinamakan kerjasama.

Tetapi, apabila penafsiran makna tingkah laku itu menyimpang atau bertentangan dengan makna yang dimaksud, kemungkinan akan

menghasilkan pertikaian, dan yang mungkin akan berlanjut mejadi persaingan. Suatu pertikaian (tidak) mungkin akan berlangsung untuk selama-lamanya (walaupun mungkin ada), sebab pada suatu saat atau suatu ketika pertikaian akan mendapatkan penyelesaiannya (walaupun bersifat sementara saja). Suatu keadaan selesainya pertikaian merupakan *working relationship* yang disebut akomodasi (*accomodation*) dan ini dapat dipandang sebagai bentuk interaksi sosial. Dengan demikian, bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu adalah terdiri dari:

- a) kerja sama
- b) pertikaian
- c) persaingan, dan
- d) akomodasi

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua bentuk umum dari interaksi sosial, yaitu *assosiatif* dan *dissosiatif*. Suatu interaksi sosial yang *assosiatif* merupakan proses yang menuju pada suatu kerja sama. Sedangkan bentuk interaksi *dissosiatif* dapat di artikan sebagai suatu perjuangan mealwan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Apakah suatu interaksi sosial *dissosiatif* mengakibatkan hal-hal positif, tergantung pada masalah yang dipertentangkan dan juga dari struktur sosial di mana pertentangan itu terjadi. Salah satu faktor yang akan dapat membatasi akibat-akibat negatif dari pertentangan itu terjadi. Salah satu faktor yang akan dapat membatasi akibat-akibat negatif dari pertentangan adalah sikap

toleransi yang telah melembaga. Dengan demikian proses interaksi dissosiatif mungkin berguna bagi masyarakat yang bersangkutan terutama dalam hal hal-hal sebagai berikut:

- a) untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif.
- b) Sebagai suatu jalan atau saluran di mana keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang ada pada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalur dengan sebaik-baiknya.
- c) Sebagai alat untuk mengadakan seleksi social.
- d) Sebagai alat untuk menyaring warga-warga masyarakat untuk mengadakan pembagian kerja.

Jadi, ada dua macam bentuk umum proses social yang timbul sebagai akibat adanya interaksi social, maka yaitu:

1. Bentuk umum Assosiatif, meliputi bentuk khusus
 - ✓ Kerja sama
 - ✓ Akomodasi
2. Bentuk umum dissosiatif, meliputi bentuk khusus
 - ✓ Pertiakaian
 - ✓ Persaingan.

e. Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan,

wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto (2008:303) dalam Sosiologi Suatu Pengantar mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsure-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang dikemukakan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsure-unsur immaterial.

Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto (2008:304) mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Definisi lain dari Selo Somardjan dalam Soerjono Soekanto (2008:305) perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2008:324) Faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan:

- a. Sistem pendidikan formal yang maju.
- b. Kontak dengan kebudayaan lain.
- c. System terbuka lapisan masyarakat
- d. Penduduk yang heterogen
- e. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan.
- f. Toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang.
- g. Disorganisasi dalam masyarakat.

Sedangkan faktor yang menghalangi jalannya perubahan antara lain:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan
2. Sikap masyarakat yang tradisional
3. *Vested interest* (kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya).
4. Prasangka (buruk) terhadap hal-hal baru.
5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan.

f. Faktor-Faktor Asosiatif dalam Proses Integrasi antar Penduduk

1. Faktor Kerjasama

Kerjasama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya yaitu *in-groupnya* dan kelompok lainnya yang merupakan *out-groupnya*. Kerjasama mungkin akan bertambah kuat apabila ada bahaya mengancam atau ada tindakan-tindakan luar yang menyinggung kesetiaan yang secara tradisional atau institutional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seorang atau segolongan orang.

Betapa pentingnya fungsi kerjasama, di gambarkan oleh Charles H.

Cooley di kutip Soerjono soekanto (2008: 238 sebagai berikut:

“kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan penegndalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kerjasama yang berguna”.

Dikalangan masyarakat Indonesia dikenal bentuk kerjasama tradisional dengan nama gotong royong. Dalam sistem pendidikan Indonesia yang tradisional, umpamanya sejak kecil tidak ditanamkan

ke dalam jiwa seseorang suatu pola perilaku agar dia selalu hidup rukun, terutama dengan keluarga dan lebih luas lagi dengan orang lain di dalam masyarakat.

Hal mana disebabkan adanya suatu pandangan hidup bahwa seseorang tidak mungkin hidup sendiri tanpa kerjasama dengan orang lain. Pandangan hidup demikian ditingkatkan dalam taraf kemasyarakatan, sehingga gotong royong sering kali diterapkan untuk menyelenggarakan suatu kepentingan.

Dalam teori-teori sosiologi dijumpai beberapa bentuk kerjasama yang biasa di beri nama *cooperation*. Kerjasama dibedakan:

1. Kerjasama spontan *spontaneous cooperation*. Adalah kerjasama yang serta merta.
2. Kerjasama langsung *directed cooperation* yaitu merupakan hasil dari perintah atasan atau penguasa
3. Kerjasama kontrak *contractual cooperation* yaitu merupakan kerjasama atas dasar tertentu
4. Kerjasama tradisioanl *traditional cooperation* yaitu merupakan bentuk kerja sama sebagai bagian atau unsure dari system social.

Biasanya dalam konteks sehari-hari, di bedakan antara gotong-royong dengan tolong menolong. Yang pertama di gambarkan dengan istilah “gugur gunung” bahasa jawa dan yang kedua adalah “sambat sinambat”. (Soerjono Soekanto 2008:72) Keduanya merupakan unsur-unsur kerukunan, terlepas dari apakah terdapat akibat-akibat positif atau negatif, kerjasama sebagai salah satu bentuk interaksi sosial merupakan gejala universal yang ada pada masyarakat dimanapun juga. Walaupun secara tidak sadar kerjasama

tadi mungkin timbul terutama di dalam keadaan-keadaan dimana kelompok tersebut mengalami ancaman dari luar.

Pada masyarakat Indonesia, terdapat bentuk kerjasama yang dikenal dengan nama “gotong royong”. Mengenai hal ini, Koentjaraningrat membedakan antara gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Selanjutnya, dikatakan bahwa kecuali dalam sambatan dalam bentuk produksi pertanian, aktivitas tolong menolong juga tampak dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang lain ialah:

1. Aktivitas tolong menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, seperti menggali sumur, mengganti dinding bilik rumah, membersihkan rumah dan atap rumah dari hama tikus dan sebagainya.
2. Aktivitas tolong menolong antara kaum kerabat (dan kadang-kadang beberapa tetangga yang paling dekat) untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan atau upacara adat lain sekitar titik-titik peralihan pada lingkaran hidup individu, hamil tujuh bulan, kelahiran, melepas tali pusat, kontak pertama dari bayi dengan tanah, pemberian nama, pemotongan rambut untuk pertama kali, pengasahan gigi, dan sebagainya.
3. Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu secara spontan pada waktu seseorang penduduk desa mengalami kematian atau bencana.

Mengenai gotong royong kerja bakti sebaiknya kita bedakan antara kerja bakti untuk proyek-proyek yang timbul dari inisiatif atau swadaya para warga komunitas sendiri, dan kerja bakti untuk proyek-proyek yang dipaksakan dari atas. Kita dapat membayangkan bagaimana proyek-proyek semacam yang pertama, yang misalnya berasal dari keputusan rapat desa sendiri dan dirasakan benar-benar sebagai proyek yang berguna, dikerjakan beresama dengan aman, rela dan penuh semangat, sedangkan sebaliknya proyek macam kedua, yang seringkali tidak difahami gunanya oleh warga desa, dirasakan saja sebagai kewajiban rutin yang memang tidak dapat dihindari kecuali dengan cara mewakilkan giliran kepada orang lain dengan bayaran. (Soleman B. Taneko 1993:116)

Soekanto dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “gotong royong apabila dikutip rumusan dari bahan simposium Pembinaan Gotong Royong dalam rangka Pembangunan Desa (18-19 Januari 1978), diartikan sebagai bentuk kerja sama yang spontan yang sudah terlembagakan yang mengandung unsur timbal-balik yang sukarela antara warga desa dan antara warga desa dengan kepala/Pemerintahan desa serta Musyawarah desa, yang insidental maupun yang kontinue dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual.

Di dalam bahasa Jawa kegiatan pertama digambarkan dengan istilah “gugur gunung”, sedangkan kegiatan kedua disebut juga “sambat-sinambat”. Apabila teori Durkheim diterapkan di sini, maka gugur gunung merupakan solidaritas mekanis, sedangkanambat sinambat merupakan solidaritas organis.

Apabila pendekatan menurut hukum adat tersebut di atas diterapkan terhadap perumusan yang diuraikan diatas, maka terlihat pula adanya beberapa inkonsistensi. Gotong-royong, yang merupakan gugur-gunung, ditafsirkan genusnya; padahal, gotong-royong merupakan *spesies* (demikian pulaambat-sinambat atau tolong menolong). Genusnya secara tradisional adalah apa yang dinamakan kerukunan. Kerukunan sebagai genus dan masing masing, gotong royong dan tolong menolong sebagai *spesies*, merupakan suatu bentuk dari proses interaksi sosial yang tradisional sifatnya.

Aktivitas yang mempunyai sifat tolong menolong atau sifat kerjasama, rupanya dianggap suatu aktivitas yang mempunyai nilai yang tinggi dalam masyarakat Gayo pada masa yang lalu. adapun yang di maksud masa lalu, ialah ketika masyarakat Gayo belum banyak digoncangkan oleh unsur-unsur pengaruh luar, sehingga aturan-aturan adat masih diamalkan dengan baik, demikian M. Junus Melalatoa. Bahwa sifat tolong menolong mempunyai nilai yang tinggi pada masa lalu itu, antara lain dapat dilihat dalam ungkapan-ungkapan atau pepatah adat yang hidup di dalam masyarakat.

Ungkapan adat itu misalnya: Alang tulung beret babantu (yang perlu ditolong dan dibantu harus ditolong).

Beluh sara loloten, moen sar tamunen (pergi satu iringan, tinggal tidak pergi satu tumpukan satu kesatuan). Bulet sara umut, tirs sara gelas. Rempak lagu re, susun lagu belo. Kedua ungkapan ini mengandung harapan tentang kekompakan tertentu, misalnya anggota kerabat klen atau anggota masyarakat satu kampung.

Aktivitas-aktivitas yang mewujudkan sifat tolong menolong itu, dapat diamati dalam kegiatan mata pencaharian hidup, kesenian, dalam aktivitas kelompok muda-mudi, dalam upacara upacara *life cycle*, dan lain lain.

Maulud Tumenggung Sis menyatakan bahwa konsep *mapalus* yang di artikan oleh orang-orang Minahasa secara umum adalah suatu kerja sama dengan dasar tolong menolong antara beberapa orang maupun kerja sama sejumlah warga suatu masyarakat untuk kepentingan umum. Didalamnya sudah terkandung pengertian saling tolong menolong secara timbal-balik atau gotong-royong tolong-menolong *wedering hulpbetoon* dan gotong-royong untuk kepentingan umum *onderiling hulpbetoon*.

Kerjasama antara dua orang untuk saling tolong menolong dan kerja sama antara puluhan atau ratusan orang baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir untuk kepentingan umum, semuanya

telah dicakup dengan istilah mapalus. Selain itu juga sudah terkandung kerjasama yang timbul secara spontan, secara kesadaran dan secara paksaan. Akan tetapi, kelihatannya konsep mapalus ini tekanannya terletak pada aktivitas tolong menolong secara timbal balik pada kegiatan-kegiatan yang bukan kepentingan umum dalam arti tertentu. (Soleman B. Taneko.1993:120)

2. Faktor Adaptasi

Ada beberapa pengertian tentang adaptasi menurut Moran 1982, adaptasi adalah suatu strategi penyesuaian diri yang digunakan manusia selama hidupnya untuk merespon perubahan-perubahan lingkungan dan sosial.

Pengertian Adaptasi dan Kebudayaan Sebagai Sistem Adaptif Tentang adaptasi, Hardesty (1977) mengemukakan bahwa: "*Adaptation is the process through which beneficial relationships are established and maintained between an organism and its environment*".

Selanjutnya, para ahli ekologi budaya *cultural ecologists* Alland (1975), Harris (1968), Moran (1982) mendefinisikan bahwa adaptasi adalah suatu strategi penyesuaian diri yang digunakan manusia selama hidupnya untuk merespon terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan sosial.

Dalam kajian adaptabilitas manusia terhadap lingkungan, ekosistem adalah keseluruhan situasi di mana adaptabilitas berlangsung/terjadi. Karena populasi manusia tersebar di berbagai belahan bumi, konteks adaptabilitasakan sangat berbeda-beda.

Suatu populasi di suatu ekosistem tertentu menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan dengan cara-cara yang spesifik. Ketika suatu populasi/masyarakat mulai menyesuaikan diri terhadap suatu lingkungan yang baru, suatu proses perubahan akan dimulai dan mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menyesuaikan diri (Moran 1982).

Sahlins (1968) menekankan bahwa proses adaptasi sangatlah dinamis karena lingkungan dan populasi manusia berubah terus menerus. Adaptasi yang dilakukan manusia terhadap lingkungan menunjukkan adanya interrelasi antara manusia dan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan *human ekologi* menekankan/menunjukkan adanya hubungan saling terkait (*interplay*) antara lingkungan fisik dan sistem-sistem sosial budaya.

3. Faktor Asimilasi

Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi

meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.

(Sorjono Soekanto 1983:80)

Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat tiga syarat, yaitu:

- a) Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda.
- b) Terjadi pergaulan antarindividu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama.
- c) Kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri.

Setelah ketiga syarat tersebut terjadi, kemudian untuk ada pula faktor yang mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan
2. Kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi
3. Kesiediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya.
4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat
5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal
6. Perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya atau perkawinan campuran (Amalgamsi)
7. Mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut.

Dengan faktor-faktor yang mendorong Asimilasi tersebut, semakin tercapainya proses Integrasi pada penduduk. Namun ada pula beberapa factor yang dapat menghalangi proses asimilasi Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi antara lain sebagai berikut.

1. Kelompok yang terisolasi atau terasing (biasanya kelompok minoritas)
2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi
3. Prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan
4. Perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Kebanggaan berlebihan ini mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok lainnya
5. Perbedaan ciri-ciri fisik, seperti tinggi badan, warna kulit atau rambut
6. Perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan
7. Golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa (Soerjono Soekanto 2008:85)

Hasil dari proses asimilasi adalah semakin tipisnya batas perbedaan antarindividu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antarkelompok. Yang kemudian semakin mendukung berlanjutnya

proses integrasi penduduk. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

4. Faktor Akulturasi

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri

Apabila diperhatikan prosesnya akulturasi dalam (id.wikipedia:2013) terjadi dalam dua cara, yaitu:

- a) Akulturasi damai (*penetration pasifique*), terjadi jika unsur-unsur kebudayaan asing dibawa secara damai tanpa paksaan dan disambut baik oleh masyarakat kebudayaan penerima.
- b) Akulturasi ekstrim, terjadi dengan kekerasan, perang, penaklukan, akibatnya unsur-unsur kebudayaan asing dari pihak yang menang dipaksakan untuk diterima di tengah-tengah masyarakat yang dikalahkan.

5. Faktor Akomodasi

Menurut Soerjono Soekanto (2008:75) istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan,

berarti adanya suatu keseimbangan (*equilibrium*) hubungan antar individu atau kelompok. dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma social dan nilai-nilai social yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto (1983:76) - Akomodasi adalah suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang mengarah kepada adaptasi sehingga antar individu atau kelompok terjadi hubungan saling menyesuaikan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan.

Sebagai suatu proses, akomodasi meunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Tujuan akomodasi dapat berbeda-beda sesuai situasi yang dihadapinya, yaitu:

1. Untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. Akomodasi disini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa antara kedua pendapat tersebut, agar menghasilkan suatu pola yang baru.
2. mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer
3. untuk memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok kelompok sosial yang hidupnya terpisah sabagai akibat factor-faktor

sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem berkasta.

Tujuan akomodasi secara Sosiologis dari akomodasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi konflik antar individu atau kelompok sebagai akibat perbedaan paham. Sehingga akomodasi disini bertujuan untuk mendapatkan suatu sintesa antara kedua pendapat tersebut agar memperoleh suatu pola baru.
2. Untuk mencegah meledaknya konflik
3. Kerjasama antar kelompok-kelompok sosial yang saling terpisah.
4. Mengusahakan peleburan antar kelompok-kelompok sosial yang terpisah. Seperti dengan perkawinan campuran atau asimilasi.

Menurut Ramlan Surbakti (1983) Pengaturan konflik akan bisa berlangsung secara efektif apabila terdapat tiga persyaratan, yaitu :

- a. Kedua belah pihak yang berkonflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka, oleh karenanya mereka harus menyadari pula perlunya melaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak.
- b. Adanya organisasi bagi kelompok yang berkonflik. Artinya, pengaturan konflik hanya akan mungkin apabila mereka yang berkonflik masing-masing telah terorganisir secara jelas. Kalau kekuatan-kekuatan yang berkonflik itu berada dalam situasi tidak terorganisir (*diffuse*), maka pengaturan konflik tidak akan efektif.

- c. Adanya aturan permainan (*rule of the game*) yang disepakati dan ditaati bersama. Apabila akomodasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik di masyarakat dengan memenuhi tiga hal seperti disebutkan Ramlan Surbakti diatas., maka proses akomodasi akan berlangsung lancar dan lebih mudah.

Jenis Konflik di Masyarakat. Menurut Ramlan Surbakti (1992), ada dua jenis konflik di masyarakat, yaitu :

- a. Konflik Horizontal, adalah konflik anatar individu atau kelompok yang diakibatkan adanya kemajemukan horizontal. Seperti konflik antar suku, agama, ras, daerah, kelompok, profesi dan tempat tinggal.
- b. Konflik Vertikal, adalah konflik antar individu atau kelompok miskin dan kaya (kekayaan) dan antara rakyat dan penguasa (kekuasaan).

Tindakan Penyelesaian Konflik Dan Pola Penyelesaian Konflik Konflik yang dibiarkan akan semakin melebar baik dalam wilayah maupun ketajaman konflik. Dalam arti, konflik kecil yang dibiarkan semakin lama akan semakin besar jumlah orang atau kelompok yang terlibat. Serta intensitas konflik juga akan semakin sengit dan tajam. Tindakan penyelesaian terhadap adanya konflik dibedakan menjadi dua hal, yaitu :

- a. *Penyelesaian Menang Kalah (win-lose solution)*, pola penyelesaian ini adalah pola penyelesaian yang hanya menguntungkan satu kelompok sedangkan kelompok yang satunya lagi dirugikan. Pola penyelesaian ini terjadi apabila :

1. Kedua kelompok yang berkonflik sama-sama tidak mau mengurangi tuntutan, sedangkan kondisi kekuatan masing-masing berbeda dimana yang satu kelompok lebih kuat sehingga menang dan kelompok satunya lagi lemah kekuatannya sehingga kalah.
2. Salah satu dari kedua kelompok tidak mau mengurangi tuntutan, sedangkan yang satunya bersedia mengurangi tuntutan.

b. Penyelesaian Menang-menang (win-win solution), pola penyelesaian ini adalah pola penyelesaian yang menguntungkan semua pihak yang terlibat konflik. Pola semacam ini terjadi bila semua kelompok yang berkonflik rela mengurangi tuntutan dengan duduk satu meja mencari pemecahan bersama secara adil. (Dahlan forum:2013)

Upaya Penyelesaian Konflik Menurut Soerjono Soekanto (1982:79), akomodasi sebagai upaya penyelesaian konflik memiliki delapan bentuk, antara lain :

1. *Coercion*, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Hal ini terjadi disebabkan salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah sekali bila dibandingkan dengan pihak lawan.
2. *Compromise*, yaitu suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutan agar dicapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada. Sikap untuk dapat melaksanakan compromise adalah

sikap untuk bersedia merasakan dan mengerti keadaan pihak lain.

3. *Arbitration*, yaitu cara mencapai compromise dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang berkedudukannya lebih dari pihak-pihak yang bertikai.
4. *Mediation*, yaitu cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini hanyalah mengusahakan suatu penyelesaian secara damai yang sifatnya hanya sebagai penasihat. Sehingga pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan-keputusan penyelesaian yang mengikat secara formal
5. *Conciliation*, yaitu suatu usaha mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai persetujuan bersama.
6. *Toleration*, sering juga dinamakan *toleran-participation* yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal.
7. *Statlemate*, adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik karena kekuatannya seimbang kemudian berhenti pada suatu titik tertentu untuk tidak melakukan pertentangan. Dalam istilah lain dikenal dengan “Moratorium” yaitu kedua belah pihak berhenti untuk tidak saling melakukan pertikaian. Namun, moratorium bisa

dilakukan antara dua belah pihak yang kurang seimbang kekuatannya.

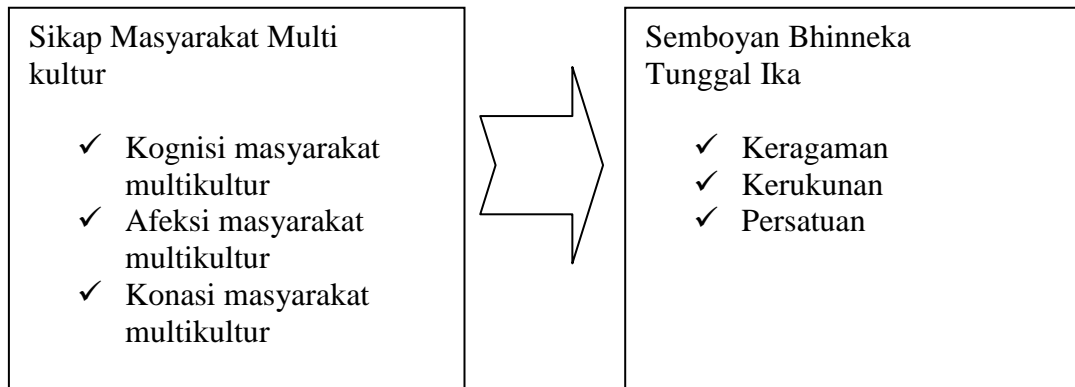
8. *Adjudication*, adalah suatu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan. Kedelapan bentuk akomodasi diatas bisa dipilih untuk dilakukan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat yang sangat beragam. Hal ini diperlukan agar proses konflik khususnya yang terjadi pada masyarakat dengan tingkat kemajemukan tinggi seperti Indonesia, tidak bisa mengarah pada situasi disintegrasi bangsa.

B. Kerangka Pikir

Bagi Negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Indonesia konsep integrasi sering di gunakan dalam rangka penyatuan wilayah Indonesia dalam satu wawasan di sebut dengan wawasan nusantara. Adanya beberapa suku-bangsa yang di miliki oleh Indonesia, di satu pihak merupakan kebanggaan tersendiri karena memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat tinggi harganya. Namun di sisi lain dengan banyaknya jumlah suku bangsa yang ada merupakan sumber timbulnya konflik.

Keberhasilan suatu daerah dalam proses integrasi diduga disebabkan oleh berbagai factor, baik factor yang berasal dari sikap dan perilaku penduduk berdasarkan adat istiadatnya, maupun dari proses beradaptasi dan interdependensi kepentingan diantara penduduk yang beragam secara primordial.

Penelitian ini akan menyelidiki pengaruh pemahaman makna bhinneka tunggal ika terhadap persilangan antar budaya di Desa Srikaya Kabupaten Lampung Timur. Keterkaitan antar variable dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1